Buletin
INFO BPPSDMP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
Edisi Mei 2016

BPPSDMP Bersama KPK
Buat Gerakan Pencegahan Korupsi Dan Gratifikasi

Salam Redaksi

Dr. Ir. Momon Rusmono, MS
Sekretaris Badan PPSDMP

Salam hangat dan salam sejahtera bagi para pembaca yang setia mengikuti perkembangan informasi dan berita yang disajikan oleh Buletin "Info BPPSDMP". Alhamdullilah, puji syukur kepada Allah SWT pada tahun 2016 ini kita telah memasuki tahun ketiga penerbitan Buletin "Info BPPSDMP" dan kami tetap berkomitmen untuk memberikan sajian informasi terbaru dan berita seputar program/kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP).

Buletin "Info BPPSDMP" yang ditujukan kepada Eselon I lingkup Kementerian Pertanian, UPT lingkup BPPSDMP, Satker Dana Dekonsentrasi dan lembaga yang terkait, diharapkan mampu menjadi media publikasi yang bersifat aktual dan informatif guna mendukung kinerja BPPSDMP baik secara eksternal maupun internal.

Pada edisi Mei Tahun 2016 sebagai Headline kami menyajikan berita mengenai "BPPSDMP Bersama KPK Buat Gerakan Pencegahan Korupsi Dan Gratifikasi". Untuk rubrik lainnya kami juga menyajikan berita kegiatan yang dilaksanakan dari masing-masing pusat lingkup BPPSDMP. Kami selalu mengharapkan dukungan, saran serta masukan dari segenap pihak untuk peningkatan kualitas dan kuantitas Buletin ini.

Semoga buletin "Info BPPSDMP" Edisi Bulan Mei tahun 2016 ini dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah informasi serta pengetahuan para Pejabat/Staf Lingkup BPPSDMP pada khususnya, dan Pejabat/Staf lingkup Kementerian Pertanian pada umumnya.

INFO BPPSDMP

Editoral

PENASEHAT
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

DEWAN PEMBINA
Sekretaris Badan PPSDMP
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian
Kepala Pusat Pelatihan Pertanian
Kepala Pusat Pendidikan, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian

PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan

REDAKTUR PELAKSANA
Kepala Sub Bagian Humas

DEWAN REDAKSI
Eko Saputra, Marresya Dessilvia, Tri Harno, Festi Agustiani

DESIGN GRAFIS
Daimatus Pito Banugroho

DISTRIBUSI
Ema Latuconsina

ADMINISTRASI
Deti Ugi Rustini, C. Sulistyo W

PENERBIT
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian

KANTOR REDAKSI
Kanpus Kementerian Pertanian Gd. D. Lt. 7. Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta Selatan 12550, Kode Pos 7214/JKSPM, Telp. 021 7804257, Email humassdm@gmail.com

DAFTAR ISI

Head Line

BPPSDMP Bersama KPK Buat Gerakan Pencegahan Korupsi Dan Gratifikasi

Info Sekretariat

"Petani Harus Dilindungi"
BPPSDMP Lakukan Sosialisasi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Info Penyuluhan

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN KELEMBAGAAN PETANI

Info Pendidikan

Transformasi STPP Magelang Menjadi Politeknik Pertanian

Info Pelatihan

BPPSDMP Dorong Petani Desa Melalui P4S

Serba-Serbi

APRESIASI KARYA PENYULUH TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016

BPPSDMP Bersama KPK

Buat Gerakan Pencegahan Korupsi Dan Gratifikasi

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja Satlak PI Lingkup BPPSDMP sebagai upaya pencegahan secara dini terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terstruktur dan penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada terjadinya kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN). Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melalui Bagian Evaluasi dan Pelaporan melaksakan Forum Apresiasi dan Pengukuhan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlat PI) Tahun 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret – 1 April 2016 di Hotel Amaris - Bogor.

“Sejak diterapkannya pola anggaran pembangunan berbasis kinerja sebagai implikasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran kita dituntut untuk mewujudkan pencapaian suatu rencana secara akuntabel/terukur, efektif dan efisien” kata Kepala Pusat Pelatihan dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), Heri Suliyanto saat pembukaan Forum apresiasi dan pengukuhan satuan pelaksana pengendalian intern (Satlak PI) tahun 2016, di Kota Bogor, Jawa Barat.

Dijelaskan lebih lanjut, penyelenggaraan kegiatan di instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, telah dirancang suatu sistem yang dapat memberi keyakinan yang memadai agar penyelenggaraan kegiatan di BPPSDMP mencapai tujuan secara efektif, dan efisien seperti pelaporan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. "Sistem ini dikenal dengan sistem pengendalian intern (SPI)," kata Heri Suliyanto yang mewakili Kepala BPPSDMP.

Forum apresiasi dan pengukuhan satuan pelaksana pengendalian intern (Satlak PI) tahun 2016 yang diikuti oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT), Satlak Pengendalian Intern Pusat dan UPT lingkup BPPSDMP ini menghadirkan pembicara dari Inspektorat Jenderal Pertanian dan Komisi Pemberantasan Korupsi .

Kegiatan Forum Apresiasi dan Pengukuhan Satuan Pelaksana Pengendalian Intern (Satlak PI) tahun 2016 ini ditutup oleh Sekretaris Badan PPSDMP Dr. Ir. Momon Rusmono, MS, beliau mengatakan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sudah sebuah keharusan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk itu beliau menghimbau agar masing-masing satker lingkup BPPSDMP melakukan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pengurangan resiko terjadinya kolusi, pengurangan resiko terjadinya pemalsuan dan kecurangan, pengawasan oleh masyarakat, Sistem penanganan keluhan, serta tindakan sanksi yang jelas, tegas, dan tindakan untuk memperbaikinya.

Adapun tujuan dari kerjasama dengan KPK adalah membangun komitmen bersama untuk memperkuat proses *Management Control System* pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPPSDMP. Menyamakan persepsi dan pemahaman untuk penyempurnaan pelaksanaan pengendalian dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan BPPSDMP. Menyusun dan menyepakati Standard Operasional Prosedur/SPO, titik kritis dan resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPPSDMP, serta memotivasi untuk melakukan korupsi dan gratifikasi di lingkungan BPPSDMP.

"Kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan komitmen memperkuat proses *Management Control System* pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran BPPSDMP, rencana Kerja Tim satlak PI BPPSDMP, Standard Operasional Prosedur/SPO, penetapan program dan kegiatan BPPSDMP," tegas Momon.

Dengan demikian SATLAK PI lingkup BPPSDMP dapat berfungsi yang diiringi dengan meningkatnya kinerja, transparansi dan pengamanan aset negara di lingkup BPPSDMP, berkurangnya jumlah kasus dan jumlah kerugian negara serta jumlah sanksi yang diberikan.(fes)

"Petani Harus Dilindungi"

BPPSDMP Lakukan Sosialisasi Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2013, tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan petani. Selama ini Petani telah memberikan kotribusi yang nyata dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi perdesaan. Dalam menyelenggarakan pembangunan Pertanian, Petani mempunyai peran sentral dan memberikan kontribusi besar. Pada saat ini, Petani dihadapkan pada kecenderungan terjadinya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melindungi sekaligus memberdayakan petani, dengan diterbitkannya Undang-Undang no 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.

Dalam rangka mewujudkan sinergitas dalam implementasi UU nomor 19 tahun 2013 dan mempercepat penyampaian informasi terhadap tindak lanjut peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melakukan sosialisasi Undang-Undang nomor 19 tahun 2013 tentang perlindungan dan Pemberdayaan petani di berbagai daerah. Hingga saat ini, Undang-Undang no 19 Tahun 2013 telah disosialisasikan di beberapa provinsi, yaitu Bali, Jambi, Purbalingga, Trenggalek, Pati, Bandung, Jakarta, Lampung dan Cirebon.

Kepala BPPSDMP, Pending Dadih Permana mengatakan, Sosialisasi UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani adalah untuk mempercepat penyampaian informasi dan tindak lanjut peraturan perundang-undangan pelaksanaanya bagi pemangku kepentingan. Dadih menjelaskan, latar belakang terbitnya Undang-Undang nomor 19 Tahun 2013 karena Undang-Undang yang ada selama ini masih bersifat parsial dan belum mengatur upaya Perlindungan dan Pemberdayaan secara jelas, tegas dan lengkap sehingga kurang memberikan jaminan kapasitas hukum serta keadilan bagi petani dan pelaksana usaha. "Petani sebagai pelaku pembangunan pertanian perlu diberi perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang, guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan secara berkelanjutan," ujarnya.

Upaya perlindungan dan pemberdayaan petani selama ini belum didukung oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif, sistemik dan holistic, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan Pelaku Usaha di bidang pertanian. Selain kebijakan perlindungan terhadap petani, upaya pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan petani yang lebih baik.

Disamping bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, Perlindungan dan pemberdayaan petani juga berguna untuk melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha tani; menunmbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani; meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. (Cha)

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS KEPEMIMPINAN KELEMBAGAAN PETANI

Pemberdayaan petani melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan pendekatan kelompok. Pendekatan ini merupakan salah satu upaya meningkatkan fungsinya sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga mereka dapat berkembang menjadi kelembagaan petani yang kuat dan mandiri yang diarahkan menjadi berbadan hukum.

Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan petani dengan fokus dan basis kelompoktani Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Pusat Penyuluhan melakukan gerakan pemberdayaan kelembagaan petani melalui Pertemuan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kelembagaan Petani yang akan berlangsung pada tanggal 13 – 16 April 2016 di Prime Hotel, Bandung.

Hal ini dilakukan sebagai salah satu wujud peran Pemerintah dalam memfasilitasi dan memberdayakan kelembagaan petani seperti kelompok tani, gapoktan dan diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi petani yang mandiri dan tangguh.

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kelembagaan Petani dibuka oleh Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, didampingi oleh Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Jawa Barat dan Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bandung serta Ketua Kelompok KTNA Pusat serta pejabat eselon III dan IV lingkup Pusat Penyuluhan Pertanian. Peserta pertemuan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kelembagaan Petani sebanyak 102 pengurus kelembagaan petani yang yang terdiri dari 34 provinsi dan 68 kabupaten.

Tujuan pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kelembagaan Petani, antara sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun strategi dan teknik peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan petani;
2. Mendapatkan masukan untuk perbaikan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

Materi yang akan disampaikan pada kegiatan ini antara lain : Kebijakan Gerakan Pemberdayaan Petani Terpadu melalui Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan, Strategi Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kelembagaan Petani, Pelaksanaan Pemberdayaan Kelompoktani di Lokasi Sentra Pangan, Penumbuhan dan Pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya, Programa Penyuluhan Pertanian, Karateristik Pimpinan Kelembagaan Petani yang Visioner, Persiapan Penyelenggaraan PENAS XV Tahun 2017 di Provinsi Aceh, Pemanfaatan Simluhtan dalam mendukung Peningkatan Kapasitas Petani.

Selain pemaparan materi dilaksanakan juga kunjungan lapang ke Gapoktan/Poktan Al-Muklis, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pemilihan kunjungan lapang ke Gabungan Gapoktan/KelompokTani AL-MUKLIS dikarenakan Gapoktan merupakan salah satu gapoktan sukses yang mandiri. Jenis usaha yang dimiliki oleh Gapoktam ini beragam antara lain Unit Pelayan Jasa Alsintan (UPJA), Gudang Gabah Pola Tunda Jual, Menampung Gabah Dari KelompokTani, Supplier beras Ke Toko dan Rumah makan, Pengolahan Pupuk Organik serta Kios Pupuk Organik serta pelatihan dan magang bagi petani/kelompok tani yang ingin mengembangkan usahanya. Setelah kunjungan lapang, peserta dibentuk menjadi 3 (tiga) kelompok yang diberikan tugas mandiri dan mempresentasikan tugasnya sebagai implementasi dari bimbingan teknis yang telah dilaksanakan.

Penutupan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Kelembagaan Petani dibuka dilaksanakan oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, didampingi oleh Kepala Sub Bidang Informasi dan Materi serta Koordinator Penyuluh Pusat. Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam menyusun strategi dan teknik peningkatan kapasitas kepemimpinan kelembagaan petani dan diperolehnya masukan untuk perbaikan kebijakan peningkatan kapasitas kelembagaan petani. (Nurlaily).

Transformasi STPP Magelang Menjadi Politeknik Pertanian

Sejalan dengan pentingnya institusi pendidikan dalam mencetak penyuluh pertanian yang handal Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Momon Rusmono menantang agar STPP Magelang melakukan revitalisasi sistem pendidikan untuk membuka program studi baru, dan selanjutnya harus berinisiatif melakukan transformasi kelembagaan pendidikan dari sekolah tinggi menjadi politeknik pertanian.

"Kalau berani saya tunggu konsep dan proposalnya dalam waktu enam bulan ke depan, harus berani agar STPP Magelang melakukan revitalisasi menjadi Politani," ujar Momon Rusmono pada kesempatan membuka kegiatan Kunjungan Pers BPPSDMP di Kampus STPP Rabu 20 April 2016 .

Menurutnya, Kementan mendorong STPP Magelang menjadi Politani untuk mengembangkan kelembagaan dan program studi vokasional bidang pertanian sesuai kebutuhan pasar, sumber daya pendidikan terstandar, dan jejaring kerjasama.

Kepala STPP Magelang, Ali Rahman menyambut baik tantangan dari pimpinan BPPSDMP Kementan untuk mengembangkan Politani di Yogyakarta, "Kami sambut baik tantangan dari pimpinan BPPSDMP untuk mengembangkan program empat studi baru di STPP Magelang, yang saat ini memang baru dua program studi yakni penyuluhan pertanian dan penyuluhan peternakan.

Dengan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, STPP Magelang mencetak sarjana sains terapan yang ahli di bidang penyuluhan pertanian dan penyuluhan peternakan dengan kemampuan teknis dan manajerial yang andal di bidangnya.

Total mahasiswa di STPP Magelang saat ini mencapai 475 orang terdiri atas 225 mengikuti program studi penyuluhan pertanian dan 220 penyuluh peternakan, yang sebagian besar adalah PNS yang mengikuti tugas belajar, dan 219 mahasiswa non-PNS atau umum dari tingkat satu hingga tingkat empat.

BPPSDMP Dorong Petani Desa Melalui P4S

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) terus berupaya meningkatkan kedaulatan dan ketahanan pangan di Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) bersama dengan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) membina para petani di desa-desa agar menciptakan hasil pertanian yang terbaik dan berkualitas.

Khusus P4S Amulat Gunung Kidul Yogyakarta ini merupakan tempat belajar, dari petani, oleh petani dan untuk petani. "P4S Amulat ini telah banyak membina, mendidik para petani disekitar desa," ujar Supraptono Sebagai Petani Berprestasi Jawa Tengah yang juga sekaligus Pengurus Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Amulat, Desa Bleberan, Gunung Kidul Yogyakarta. Supraptono menambahkan, dengan adanya P4S ini mewujudkan petani cerdas, mandiri dan sejahtera," tegasnya.

P4S ini memang terkenal memiliki ciri khas mandiri, swadaya dan sukarela. "Harapan kami P4S ini menjadi jembatan akses informasi dan teknologi dari penyuluh kepada petani dan meberikan peluang serta wawasan bidang pertanian dan agribisnis," terang Supraptono.

Dalam tiga tahun P4S Amulat ini telah melatih 120 Kelompok Tani dan Taruna Tani terdiri dari 3600 orang. Perbenihan palawija, perbenihan sapi lokal, pengolahan pupuk organik, pakan altetnatif menjadi materi pelatihan dalam P4S ini.

"Mendukung ketahanan pangan pemerintah diharapkan Desa Beleberan ini menjadi desa mandiri pangan dan desa mandiri benih bisa terwujud," harap Supraptono.

APRESIASI KARYA PENYULUH TINGKAT KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016

Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Pembangunan ekonomi masih akan tetap berbasis pertanian secara luas. Namun, sejalan dengan tahapan-tahapan perkembangan ekonomi maka kegiatan jasa-jasa dan bisnis berbasis pertanian juga akan semakin meningkat, dengan kata lain kegiatan agribisnis akan menjadi salah satu kegiatan unggulan pembangunan ekonomi nasional dalam berbagai aspek yang luas.

Penyuluhan pertanian sebagai bagian integral pembangunan pertanian merupakan salah satu upaya pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraannya. Untuk itu kegiatan penyuluhan pertanian harus dapat mengakomodasikan aspirasi dan peran aktif petani dan pelaku usaha pertanian lainnya melalui pendekatan partisipatif. Pengembangan pembangunan pertanian di masa mendatang perlu memberikan perhatian yang khusus terhadap penyuluhan pertanian, karena penyuluhan pertanian merupakan salah satu kegiatan yang strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan, petani ditingkatkan kemampuannya agar dapat mengelola usaha taninya dengan produktif, efisien dan menguntungkan, sehingga petani dan keluarganya dapat meningkatkan kesejahteraanya. Meningkatnya kesejahteraan petani dan keluarganya adalah tujuan utama dari pembangunan pertanian.

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi penyuluh pertanian khususnya di Kabupaten Sukabumi, sekaligus persiapan Temu Penyuluh Tingkat Provinsi, maka diselengarakan rangkaian kegiatan Apresiasi Karya Penyuluh Tingkat Kabupaten Sukabumi pada tanggal 25-26 April 2016 di Hotel Selabintana, Sukabumi. Kegiatan ini merupakan inisiatif Kabupaten Sukabumi dan Pusat Penyuluhan Pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian mendukung prakarsa Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kapasitas penyuluh melalui berbagai kegiatan.

Apresiasi Karya Penyuluh Tingkat Kabupaten Sukabumi dibuka oleh Wakil Bupati Kabupaten Sukabumi didampingi oleh Asisten Daerah, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, Pejabat eselon II,III dan IV Pusat Penyuluhan Pertanian serta para pejabat lingkup Pemerintahan Kabupaten Sukabumi.

Sebagai acara pembuka akan dilaksanakan Temu Wicara Penyuluh dengan Tema "**Kelembagaan Penyuluhan Pasca diundangkannya Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**". Tujuan pelaksanaan Temu wicara ini untuk menyamakan persepsi tentang Penyelenggaraan penyuluhan yang telah diaturdalam UU No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) pasca keluarnya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana UU No. 16 Tahun 2006 merupakan hukum yang bersifat khusus (*lexspecialis*) tentang penyelenggaraan penyuluhan, sedangkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bersifat umum (*lexgeneralis*).

Selain pelaksanaan temu wicara, dilaksanakan juga lomba asah terampil penyuluh, perlombaan inovasi teknologi, lomba pidato penyuluhan berbahasa sunda, pembuatan artikel, quiz keluarga BP3K, quiz Penyuluhan 10 ribu dan penilaian karya ilmiah.

Diharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan motivasi penyuluh dalam melakukan bimbingan serta pendampingan kepada petani/poktan/gapoktan sehinga tujuan pembangunan pertanian dapat terwujud. (Nurlaily).

Ralat edisi April 2016 halaman 9 (Info Pelatihan):
"Pusat Penyuluhan Pertanian Kaji Ulang Kebutuhan SKKNI Sektor Pertanian" Seharusnya tertulis "Pusat Pelatihan Pertanian Kaji Ulang Kebutuhan SKKNI Sektor Pertanian"

Galeri Kunjungan Pers BPPSDMP